

**LAPORAN KINERJA  
ESELON 2  
TRIWULAN III TAHUN 2023**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
(SATPOL PP)  
KABUPATEN LUMAJANG  
JL. JENDERAL HARIYONO NO. 160 TLP. /  
FAX. (0334) 887467**



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023**  
**PEJABAT ESELON II**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

<b>NAMA</b>	<b>: HINDAM ADRI ABADAN, S.IP</b>
<b>NIP</b>	<b>: NIP. 19880712 200701 1 002</b>
<b>PANGKAT</b>	<b>: PEMBINA TINGKAT I</b>
<b>GOLONGAN</b>	<b>: III/D</b>
<b>JABATAN</b>	<b>: Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. ASPEK STRATEGIS**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

##### **A.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD**

###### **Kedudukan**

- Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **A.2 Tugas Pokok**

- Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
- pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan

- pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **A.3 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danperlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danperlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- Penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **A.4 Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja**

- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasif, dan menggunakan pendekatan represif/upaya paksa apabila diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **A.5 Kerjasama dan Koordinasi**

- Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
- Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya, bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- Kerjasama sebagaimana, didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

#### **B. ISU STRATEGIS**

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, antara lain :

1. Belum adanya relawan petugas penanganan kebakaran
2. Minimnya Sarana dan prasarana terkait penanganan kebakaran dan non kebakaran
3. belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran
4. Terbatasnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda/Perkada

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **A. TUJUAN**

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan yaitu “ ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat***“

#### **B. SASARAN**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sasaran adalah Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan

kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur dan sarana sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan. Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 5 ( lima ) Tahun kedepan ( 2018 – 2023 ) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum, untuk selanjutnya target sasaran dan tujuan bisa kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Lumajang**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan ketenteraman dan Ketertibn Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	80.1	76	83,6	82,63	83	83,5
	Mingkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Penegakan Perda / Perkada	100%	100%	100%	85%	85%	85%
		Presentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)  Penjelasan :  1. Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	100%	94,59%	100%	35%	40%	75%



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### A.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan capaian kinerja sebagai berikut :

#### A.2 Capaian Kinerja Tujuan

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tujuan (IKU)**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83	77,88	94	Penilaian dari bagian organisasi

#### A.3 Capaian Kinerja Sasaran:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam		Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83	77,88	94	Sisa capaian kinerja pada triwulan berikutnya
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada	85%	82,81%	97,42%	Sisa capaian kinerja pada triwulan berikutnya
		Perentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan: Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	75%	70,66%	83,13%	

**Keterangan:****Indikator I**

Persentase Penegakan Perda/Perkada, formulasi penghitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda/Perkada pada tahun N}} \times 100\%$$

Untuk menghitung/menjabarkan formulasi indikator diatas dasar penghitungannya adalah diambil dari data pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2023. Adapun data pelanggaran dimaksud pada tabel data pelanggaran Perda/Perkada berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Data Pelanggaran Perda/Perkada**  
**Triwulan II Tahun 2023**

No	Jenis Penertiban	Nomor Perda dan Perkada	Penertiban	
			Jumlah Kegiatan Penertiban	Jumlah Pelanggaran
1	Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Jalan	1	1
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2012 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	1
3	Perda Lumajang Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Pajak Pemotongan Hewan	Peraturan Daerah Lumajang Nomor 12 Tahun 1981 T - Pajak Pemotongan Hewan	1	1
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 13 Tahun 1995 - Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah	360	11
5	Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2020 - Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi	5	13
6	Penertiban dan pembinaan Pedagang kaki Lima (PKL)	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang	360	359
7	Restribusi Ijin mendirikan bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang	2	2
8	tambang ilegal	Perda no 18 Tahun 2006 - surat ijin pertambangan daerah	1	1
9	Pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten Lumajang	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2009 - Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang	1	1
10	Pajak mineral batuan dan logam	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	1

11	Penyelenggaraan Reklame	Peraturan bupati Lumajang No.54 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Reklame	36	1.300
12	Tempat Penimbunan (Stockpile) Terpadu	Peratura Bupati Lumajang No.40 Tahun 2022 - Tempat penimbunan pasir (stokcpile ) terpadu	180	1
13	Operasi rokok ilegal	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	279 sasaran	92
14	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 - Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	1	1
15	Pajak Daerah	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 04 Tahun 2011 - Pajak Daerah	1	1
	Total Pelanggaran			1.786

Dari table di atas maka Persentase Penegakan Perda/Perkada adalah:

$$= \frac{1.479 \text{ kasus pelanggaran yang diselesaikan sampai Triwulan III Tahun 2023}}{1.786 \text{ kasus pelanggaran sampai Triwulan ITahun 2023}} \times 100\%$$

$$= 82,81\%$$

Analisa capain kinerja:

Jumlah pelanggaran pada triwulan III Tahun 2023 sebanyak 1.786 pelanggaran dengan kasus pelanggaran yang ditangani 1.479 kasus sehingga presentase Penegakan Perda/Perkada pada triwulan III Tahun 2023 sebesar 82,81%, capaian kinerja sebesar 97,42 %

Adapun penyebab tingginya kasus pelanggaran yaitu

1. Minimnya pemamahaman masyarakat terkait Perda/Perkada
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam kegiatan penegakan perda/perkada
3. Minimnya jumlah SDM dalam kegiatan penegakan perda/perkada
4. Minimnya pemahaman masyarakat terkait perda/perkada

## Indikator II

Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) perhitungan formulanya adalah

$$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time Rate pada tahun N)}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100$$

Penjelasan :

Tingkat Waktu tanggap (*Respon Time Rate* ) 15 Menit/Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standart Tekhnis Pelayanan Dasar Pada Standart Peleyanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud adalah dari menerima pengaduan kejadian kebakaran sampai petugas pemadam tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKB) waktunya 15 menit, untuk selanjutnya data response time rate s/d Triwulan II Tahun 2023 bisa kita lihat pada table berikut ini:

**Tabel. 3.4**  
**Data Penanganan Penanggulangan bencana Kebakaran**  
**Triwulan I Tahun 2023**

No	Bulan	Jumlah Kebakaran	Response Time	Tidak Respon Time
1	Januari	3	2	1
2	Februari	2	1	1
3	Maret	6	6	0
4	April	1	1	0
5	Mei	7	6	1
6	Juni	9	8	1
7	Juli	13	4	9
8	Agustus	9	6	3
9	September	25	19	6
	<b>Jumlah</b>	<b>75</b>	<b>53</b>	<b>22</b>

Dari tabel diatas Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) bisa dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{53 \text{ kejadian kebakaran yang sesuai respon time}}{75 \text{ kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

$$= 70,66\%$$

Dari perhitungan diatas realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) pemadam kebakaran adalah 70,66%, sedangkan target tahun 2023 adalah 85%, jadi capaian kinerja pada triwulan III sebesar 83,13 %.

Adapun faktor keberhasilan diatas adalah kejadian kebakaran banayak di daerah berjarak dibawah 8 Km dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja

**Tabel 3.5**  
**Pemenuhan Capaian Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada	117,60 %	87,88 %	61,43 %			17,27 %	24,57 %	37,63 %			14,69 %	27,96 %	61,26 %		
		Presentase Pelanggaran Masyarakat yang di Tindakanjuti oleh Linmas	60%	68,75 %	73%			100%	100%	100%			166,67 %	145,45 %	136,99 %		
		Persentase Penegakan Perda/Perkada				85%	85 %				83 %	20 %				98 %	97,42 %
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	25%	30%	35%	100 %	75 %	94,59 %	100%	100%	70 %	82 %	378,36 %	333,33 %	285,71 %	70 %	83,13 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penjelasan: Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK) dalam kota 15 menit															

**Tabel 3.6**  
**Data Realisasi Sasaran Program dan Anggaran**  
**Triwulan II Tahun 2023**

No	Program	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program ( <i>outcome</i> )	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan III Tahun 2023	
			4		5		6			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100	%	4.882.815.817	80	%	3.606.399.419	80%	73,86 %
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	9.690.054.247	75	%	5.663.601.014	75%	74,44 %
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100	%	544.287.720	75	%	425.952.000	75%	98,31 %

## B. REALISASI ANGGARAN

Berikut adalah program / kegiatan yang telah mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja, sebagai berikut :

### B.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Triwulan II:

**Tabel 3.7**  
**Data Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran S/D TW 3 Tahun 2023**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> ) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D TW 3 Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Ss/d tw 3 Tahun 2023			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3		4		4			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100 %	%	4.882.815.817	75 %	3.606.399.419	75 %	3.606.399.419	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	%	720.000	75 %	720.000	75 %	720.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	-	3	dokumen	-	3	dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	laporan	720.000	3	laporan	720.000	3	laporan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D TW 3 Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Ss/d tw 3 Tahun 2023		
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	%	3.615.164.992	70	%	2.728.623.456	70	%	2.728.623.456
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	orang/bulan	3.554.527.992	9	orang/bulan	2.687.710.456	9	orang/bulan	2.687.710.456
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	59.647.000	9	dokumen	39.923.000	9	dokumen	39.923.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	990.000	3	laporan	990.000	3	laporan	990.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	laporan	-	12	laporan	-	12	laporan	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %	%	134.566.219	93	%	110.978.100	93	%	110.978.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	paket	10.520.469	25	paket	10.324.500	25	paket	10.324.500



Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D TW 3 Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Ss/d tw 3 Tahun 2023		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	81.479.040	4	paket	81.026.700	4	paket	81.026.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	laporan	8.862.710	2	laporan	6.504.500	2	laporan	6.504.500
Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	33.704.000	9	laporan	13.122.400	9	laporan	13.122.400
Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya			-	-	0	-	-	0	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	%	625.916.000	75	%	438.717.919	75	%	438.717.919
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	laporan	56.000	9	laporan	52.000	9	laporan	52.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	119.040.000	9	laporan	63.708.277	9	laporan	63.708.277
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	506.820.000	9	laporan	374.957.642	9	laporan	374.957.642
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	%	506.448.606	62	%	327.359.944	62	%	327.359.944

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D TW 3 Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Ss/d tw 3 Tahun 2023		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	485.848.606	24	unit	315.884.944	24	unit	315.884.944
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	unit	20.600.000	4	unit	11.475.000	4	unit	11.475.000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	%	9.690.054.247	150	%	5.663.601.014	150	%	5.663.601.014
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	%	5.206.831.394	300	%	3.107.169.464	300	%	3.107.169.464
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	60	kasus	462.000.000	24	kasus	306.000.000	24	kasus	306.000.000

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D TW 3 Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Ss/d tw 3 Tahun 2023		
Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	2.841	kasus	3.055.451.644	1.486	kasus	1.504.327.464	1.486	kasus	1.504.327.464
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	dokumen	478.717.000	9	dokumen	385.088.000	9	dokumen	385.088.000
Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	dokumen	14.040.000	9	dokumen	6.850.000	9	dokumen	6.850.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80	orang	140.145.000	80	orang	132.254.000	80	orang	132.254.000

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D TW 3 Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Ss/d tw 3 Tahun 2023		
Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam tehnik pencegahan kejahatan	12	dokumen	1.056.477.750	9	dokumen	772.650.000	9	dokumen	772.650.000
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12	laporan	-	3	laporan	-	3	laporan	-
Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100 %	%	4.483.222.853	94	%	2.556.431.550	94	%	2.556.431.550
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha	12	laporan	2.975.836.200	9	laporan	1.429.440.250	9	laporan	1.429.440.250
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	laporan	30.884.000	9	laporan	19.940.000	9	laporan	19.940.000

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D TW 3 Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Ss/d tw 3 Tahun 2023		
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	laporan	1.476.502.653	9	laporan	1.107.051.300	9	laporan	1.107.051.300
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100 %	%	544.287.720	100	%	425.952.000	100	%	425.952.000
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	100 %	%	544.287.720	100	%	425.952.000	100	%	425.952.000
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	laporan	453.930.000	9	laporan	337.336.000	9	laporan	337.336.000

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> ) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D TW 3 Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Ss/d tw 3 Tahun 2023		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4	unit	5.775.000	3	unit	5.184.000	3	unit	5.184.000
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27	orang	84.582.720	-	orang	83.432.000	-	orang	83.432.000
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	%	-	-	%	-	-	%	-
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	20	desa/kelurahan		-	desa/kelurahan	-	-	desa/kelurahan	-

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program ( <i>outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> ) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah S/D TW 3 Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Ss/d tw 3 Tahun 2023		
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	%	-	75	%	-	75	%	-
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12	laporan		9	laporan	-	9	laporan	-

Tabel.38  
Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target									Realisasi								
			2021		2022		2023			2021		2022		2023						
			K	Rp	K	Rp		%		K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota DAU	Persentase Pemenuhan Fasiitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	N / A	N / A	6.001.101.418	100	%	5.255.247.102	100	%	4.882.815.817	N / A	N / A	5.871.515.461	100	%	5.094.487.810	%	3.606.399.419	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	N / A	N / A	6.646.500	100	%	1.754.000	100	%	720.000	N / A	N / A	6.646.500	100	%	1.742.000	%	720.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N / A	N / A	3.280.500	3	dokumen	884.000	3	dokumen	-				3	dokumen			-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N / A	N / A	3.366.000	5	laporan	870.000	5	laporan	720.000				5	laporan			720.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N / A	N / A	4.103.565.053	100	%	4.116.109.613	100	%	3.615.164.992	N / A	N / A	4.081.927.027	100	%	3.961.590.351	21	%	2.728.623.456
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N / A	N / A	4.039.627.561	12	orang/bulan	4.076.765.613	12	orang/bulan	3.554.527.992				12	orang/bulan			2.687.710.456	



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target									Realisasi								
			2021			2022			2023			2021		2022		2023				
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N / A	N / A		12	dokumen	35.309.000	12	dokumen	59.647.000				12	dokumen			39.923.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan (SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N / A	N / A	53.830.492						990.000								990.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N / A	N / A	2.232.000	5	laporan	2.175.000	5	laporan	-				5	laporan			-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	N / A	N / A	7.875.000	18	laporan	1.860.000	18	laporan	-				18	laporan			-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Falisitas Administrasi Umum PD	N / A	N / A	261.909.200	100	%	155.820.259	100	%	134.566.219	N / A	N / A	261.573.305	100	%	153.612.400	17	%	110.978.100
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N / A	N / A	16.070.890	25	paket	7.067.280	25	paket	10.520.469				25	paket			10.324.500	
	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N / A	N / A	141.298.050	4	paket	42.587.259	4	paket	81.479.040				4	paket			81.026.700	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target									Realisasi								
			2021			2022			2023			2021		2022		2023				
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	N / A	N / A	54.171.260	2	paket	11.996.820	2	paket	8.862.710			2	paket			6.504.500		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N / A	N / A	46.769.000	45	laporan	44.230.000	45	laporan	33.704.000			45	laporan			13.122.400		
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		N / A	N / A				49.938.900				N / A	N / A	223.943.500						
	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	N / A	N / A	475.888.080	100	%	600.346.000	100	%	625.916.000	N / A	N / A		100	%	596.533.805	25	%	438.717.919
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	N / A	N / A	13.356.000						56.000								52.000	
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N / A	N / A	66.562.080	12	laporan	108.850.000	12	laporan	119.040.000			12	laporan				63.708.277	
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N / A	N / A	395.970.000	12	laporan	491.496.000	12	laporan	506.820.000			12	laporan				374.957.642	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	N / A	N / A	569.726.030	100	%	381.217.230	100	%	506.448.606	N / A	N / A	569.596.661	100	%	381.009.254		%	327.359.944
	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	N / A	N / A	516.325.500	33	unit	368.817.230	33	unit	485.848.606			33	unit				315.884.944	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target									Realisasi								
			2021			2022			2023			2021		2022		2023				
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinannya																		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N / A	N / A	25.800.000	5	unit	12.400.000	5	unit	20.600.000			5	unit			11.475.000		
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	N / A	N / A	5.861.594.000	85	%		85	%	9.690.054.247	N / A	N / A	5.828.379.350	85	%	6.604.055.062	47	%	5.663.601.014
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota	2.Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N / A	N / A	5.438.949.000	100	%	4.127.564.000	100	%	5.206.831.394	N / A	N / A	5.408.694.000	100	%	4.127.046.000		%	3.107.169.464
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan,dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	N / A	N / A	340.425.000	365	kasus	1.693.240.000	365	kasus	462.000.000			365	kasus					306.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target									Realisasi						
			2021			2022			2023			2021		2022		2023		
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	N / A	N / A	1.935.950.000	476	kasus	1.179.000.000	476	kasus	3.055.451.644			476	kasus			1.504.327.464
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	N / A	N / A	288.021.250	12	dokumen	313.300.000	12	dokumen	478.717.000			12	dokumen			385.088.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	N / A	N / A	21.862.500						14.040.000							6.850.000



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target								Realisasi									
			2021		2022		2023		2021		2022		2023							
			K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	N / A	N / A	179.417.000	12	laporan	1.328.381.500	12	laporan	2.975.836.200			12	laporan			1.429.440.250		
	Pengawasan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	N / A	N / A	46.394.750	12	laporan	44.800.000	12	laporan	30.884.000			12	laporan			19.940.000		
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	N / A	N / A	196.833.250	12	laporan	1.406.454.074	12	laporan	1.476.502.653			12	laporan			1.107.051.300		
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupten	N / A	N / A	605.946.860	100	%	540.831.530	100	%	544.287.720	N / A	N / A	605.116.500	100	%	539.723.888	34	%	425.952.000
	Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Berbahaya	Persentase Penanganan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Daerah	N / A	N / A	602.246.860	100	%	540.831.530	100	%	544.287.720	N / A	N / A	601.516.500	100	%	539.723.888		%	425.952.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target									Realisasi								
			2021			2022			2023			2021		2022		2023				
			K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.																			
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	N / A	N / A	523.528.000	12	laporan	469.655.000	12	laporan	453.930.000	N / A	N / A	523.359.000	12	laporan	469.636.888	3	laporan	337.336.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	N / A	N / A	78.718.860	4	unit	71.176.530	4	unit	5.775.000	N / A	N / A	78.157.500	4	unit	70.087.000	0	unit	5.184.000
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	N / A	N / A		40	orang		40	orang	84.582.720	N / A	N / A	3.600.000	40	orang		40	orang	83.432.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	N / A	N / A	3.700.000	100	%		100	%	-	N / A	N / A		100	%				-
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (SATUAN POLISI)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan	N / A	N / A	3.700.000	20	orang		20	orang		N / A	N / A		20	orang		-		-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target							Realisasi								
			2021		2022		2023			2021		2022		2023				
			K	Rp	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	PAMONG PRAJA)	Kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya																
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	N / A	N / A	100	%		100	%		-	N / A	N / A	100	%		%	-
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	N / A	N / A	12	laporan		12	laporan		N / A	N / A	12	laporan		3	laporan	-



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Triwulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 dengan target sebesar 83 , dan realisasi sebesar 77,88/capaian kinerja sebesar 94%
2. Capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja triwulan II Tahun 2023 terdiri atas 1 sasaran yakni ***Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat***. Dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yakni:
  - a. Persentase Penegakan Perda/Perkada dengan target 85% dan realisasi sebesar 82,81 %/ capaian kinerja sebesar 97,42%.
  - b. Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) dengan target sebesar 75% sedangkan realisasinya sebesar 70% /capaian kinerja sebesar 83,13%
3. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada Triwulan III menunjukkan keberhasilan.

### **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Dalam upaya menindaklanjuti indikator yang masih dipandang kurang berhasil upaya yang dilakukan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kembali indikator dan target pada sasaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang di dalam Matrik Renstra OPD tahun 2018-2023 yang nantinya dijadikan sebagai bahan reuiu Rentra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

2. Mengoptimalkan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat terhadap produk Hukum Daerah
3. Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga terkait peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya bencana kebakaran dengan cara memberikan penyuluhan/edukasi kepada masyarakat/badan usaha dalam hal pencegahan sedini mungkin terjadinya bencana kebakaran.

Demikian laporan kinerja ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

Lumajang, 30 September 2023

Plt. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Sekretaris



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP  
NIP. 198307122007011002